

Analisis Manajemen Pembiayaan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang

Abdul Rokhim, Adi Aliyan, Ara Hidayat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: abdulrohim110285@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai manajemen pembiayaan di SMP Al-Irsyad Pemalang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber datanya terdiri dari kepala sekolah, guru senior, ketua komite, dan siswa. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terstruktur dan mendalam, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan melakukan member check, kecukupan referensi, dan melakukan triangulasi. Hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Pemalang telah dilakukan dengan baik oleh Tim Manajemen BOS sekolah Adapun perencanaan pengelolaan pembiayaan di SMP Al-Irsyad Pemalang dibuat pada saat penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dengan proses penyusunan yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk diawali dengan EDS, dengan melibatkan seluruh komponen sekolah sesuai dengan petunjuk. Kedua, efektifitas pelaksanaan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad telah dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan guru dan komite sekolah. Ketiga, pengawasan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Pemalang dilakukan oleh instansi terkait seperti dari Inspektorat pusat dan daerah.

Kata kunci: Manajemen, pembiayaan.

Abstract: This study aimed to obtain information komprehensif the empowerment of teachers and school principals in SMP Al-Irsyad Pemalang. This research is a qualitative descriptive penelitian. Source data is comprised of the principal, senior teachers, chairman of the committee, and students. Data collection procedures performed by observation and in-depth structured interviews, and documentation . Checking the validity of the findings made by the member check, the adequacy ofreference , and triangulate. The results of the following conclusions. Financial planning at the Junior High School Al-Irsyad Pemalang has done well by the ManagementTeam BOS school The planning of financing management in SMP Al-Irsyad Pemalang made during the preparation of Budget Plan School (RAPBS) with a preparationprocess performed by a team that already formed starting with EDS, involving allcomponents of the school in accordance with the instructions. The effectivenessof the financing in the Junior High School Al-Irsyad have are conducted effectivelyby involving teachers and school committees. Supervision of financing in theJunior High School Al-Irsyad conducted by relevant agencies as of the Inspectorateof the center and the regions, from the department.

Keywords: Management, financing.

Pendahuluan

Sekolah Islam merupakan lembaga pendidikan formal yang strategis dalam membentuk karakter anak didik. Akhir-akhir ini sedang merebaknya sekolah islam dengan sistem pembelajaran *fulday school*, dengan progam unggulan Tahfiz Alquran. Pengelolaan kegiatan pendidikan sekolah islam adalah ujung tombak dalam terwujudnya pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan mutu pendidikan guna menghasilkan mutu lulusan yang diinginkan masyarakat, maka sekolah islam harus dikelola secara profesional, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mecacapai tujuan pendidikan yang hendak di capai. Melihat betapa pentingnya peran pembiayaan dalam proses pendidikan, sehingga pemerintah melalui UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pasal 46 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga diperuntukan bukan untuk Pemerintah Pusat saja melaikan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana untuk terselenggaranya pendidikan bagi warga negara dari mulai usia tujuh tahun sampai usia lima belas tahun.

Dewasa ini semua sekolah di Indonesia menerima BOS sebagai sumber utama keuangan lembaga yang diberikan langsung oleh Kementrian Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota, adapun SMP Al-Irsyad Pemalang salah satu yang menerima dana BOS tersebut. Besaran 20 % APBN dialokasikan untuk pendidikan namun tidak menjamin sekolah swasta menjadi lebih baik. Dengan adanya program pendidikan gratis ini bisa jadi menjadi salah satu halangan SMP Al-Irsyad untuk berkembang, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mendasari program ini pada kenyataannya lebih banyak berfokus pada memenuhi kebutuhan siswa, sementara kebutuhan lain seperti kesejahteraan guru seakan-akan bukan menjadi fokus utama. Sehingga berdampak pada adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara guru sekolah umum dengan guru sekolah islam swasta dimana beban pembiayaan ditanggung sendiri.

Kebijakan nasional pemberian dana BOS untuk semua siswa yang berada di usia wajib belajar pendidikan dasar di Indonesia kurang efektif dan efisien, maka sekolah islam swasta tidak lagi diperbolehkan untuk menarik biaya dari siswa. Padahal sebelumnya sumber pendaan pendidikan sekolah islam swasta beragam, bukan hanya dari pemerintah melainkan dari keluarga siswa, masyarakat dan yayasan bagi yang

berstatus yayasan¹. Persoalan yang sering terjadi dalam lembaga pendidikan salah satunya yaitu terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya yaitu sumber dana yang terbatas, pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan atau bahkan dana yang bisa dicairkan tidak sepenuhnya. Sedangkan pembiayaan sekolah membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

SMP Al-Irsyad al-Islamiyah Pernalang salah satu lembaga pendidikan islam swasta yang pembiayaan pendidikannya mandiri artinya selain mendapat kucuran dana BOS dari kementerian pendidikan, pembiayaan juga bersumber dari masyarakat yaitu orang tua siswa di mana SPP perbulannya Rp. 150.000 untuk kelas unggulan dan Rp. 100.000 untuk kelas reguler. Dalam Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah tahun pelajaran 2018/2019, tertuang bahwa rencana anggaran yang dibutuhkan sekolah selama satu tahun sebesar Rp. 424.000.000, namun dana bos yang dapat dicairkan di semester pertama periode bulan Juli-Desember 2018 hanya sekitar 40% yaitu sebesar Rp.168.000.000, dengan asumsi per siswa mendapat Rp. 200.000 dengan jumlah siswa keseluruhan dari kelas 7 sampai kelas 9 adalah 424 siswa. Untuk memenuhi anggaran satu tahun kebutuhan sekolah ternyata masih kurang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih jauh tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan Madrasah Swasta dan menelaah bagaimana kepala madrasah membuat strategi dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dapat dipenuhi oleh dana BOS.

Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif. Peran pembiayaan tidak dapat diabaikan, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.² Biaya adalah seluruh sumber dana baik langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, dan orang tua) yang diperuntukan bagi penyelenggaraan sekolah.

Termasuk dalam pendapatan biaya pendidikan pada sekolah diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan dari masyarakat. Saat ini, sebagian besar biaya sekolah swasta berasal dari para siswa dan yayasan. Sekolah dasar memiliki sumber pendapatan, sebagai berikut: dari pemerintah yaitu dalam bentuk APBN ataupun APBD; dari orang tua siswa dalam bentuk uang SPP (Sumbangan

¹ Muhammad Murtadlo, "Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Swasta Unggulan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 14, no 1 (April 2016): 99.

² Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

Pelaksanaan Pendidikan), biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, dan sebagainya; dari Yayasan penyelenggara yang terdiri dari biaya operasional sekolah atau biaya pengembangan sekolah; dari donatur yang terdiri dari bantuan sukarela masyarakat umum, bantuan sukareka masyarakat umum rutin, dan bantuan dari alumni; dari hasil usaha sekolah yang terdiri dari kantin sekolah, koperasi sekolah, unit usaha sekolah, penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah; dan dari sumber-sumber lain yang terdiri dari tabungan sekolah yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan masing-masing sekolah.³

Pendistribusian manfaat pendidikan sangat bergantung pada keuangan sekolah yang sering dibebankan pada kelompok tertentu. Manfaat ini pengertian secara tradisional dinyatakan dalam bentuk uang atau jasa yang dihabiskan untuk kepentingan siswa. Manfaat dalam sistem pendidikan memiliki tujuan menghasilkan output pendidikan jangka pendek dan jangka panjang.⁴

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan juga melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan/pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian. Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun Maisyarah menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi tugas kepala sekolah untuk menyusunnya. Untuk itu kepala sekolah, terutama sekolah swasta harus mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas. Selain itu, biasanya sekolah swasta juga mengembangkan penggalan dana dalam bentuk. Pertama, uang gedung atau uang pembangunan. Uang gedung ini diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa baru. Formula sumbangan ini diberikan setelah siswa dinyatakan diterima menjadi siswa pada suatu sekolah. Kedua uang SPP siswa, uang SPP dibayarkan rutin tiap bulan oleh siswa guna membayar

³ Arita Marini, *Manajemen Sekolah Dasar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 14.

⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 32.

biaya pendidikan. Ketiga, uang bantuan dari donatur dan sumber lain selain dari yayasan, sumbangan ini bersifat sukarela dan tidak mengikat. Keempat, dana bantuan yayasan yang menaungi sekolah, uang ini bersifat kondisional, apabila dirasakan keuangan kurang maka yayasan memberikan talangan dana, hal ini disebabkan terlatnya dana SPP siswa yang kadang nunggak sampai beberapa bualan.

Setelah mengetahui detail sumber dana sekolah, selanjutnya sekolah menyusun RAPBS. Dalam menyusun RAPBS kepala sekolah biasanya membentuk tim penyusun RAPBS yang anggotanya terdiri dari, kepala sekolah, wakasek, bendahara BOS, bendahara sekolah dan komite sekolah. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Rencana pembiayaan merupakan hal yang berkaitan dengan penjabaran pembiayaan dari program kerja tahunan sekolah atau madrasah. Pembiayaan yang direncanakan baik dari penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun itulah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam Depdiknas dijelaskan ada beberapa langkah dalam penyusunan RAPBS, yaitu menginventaris program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang; menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas; menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan; membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkannya ke dalam format baku RAPBS dan menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.

Sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, maka pemerintah menyediakan dana BOS guna memberikan subsidi pembiayaan pendidikan untuk sekolah dasar. Penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut: (1) pembelian/pengadaan buku teks/paket pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan; (2) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotokopi, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan); (3) pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi

siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotokopi, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba; (4) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotokopi/pengadaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); (5) pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor; (6) pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset; (7) pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; (8) pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; (9) pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; (10) pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dan lain-lain); (11) pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flashdisk), pengadaan surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; (12) pembelian komputer (*desktop/work station*) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; dan (13) bila seluruh komponen 1 s/d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebel sekolah.

Mempergunakan anggaran, ada azas yang lazim dijadikan pedoman yaitu azas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri

oleh masyarakat. azas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat dan sebagainya. Tugas manajemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu financial planning, implementation, and evaluation. Jones mengemukakan perencanaan finansial yang disebut *budgeting*, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. *Implementation involves accounting* (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.⁵

Pengawasan (*controlling*) adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perencanaan.⁶ Pengawasan yang dilakukan adalah kegiatan penilaian apakah manajemen keuangan pada sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan di masa yang akan datang.⁷ Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan hasil-hasil temuan. Kegiatan memantau atau monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual (*actual performance*), baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang atau yang telah dilakukan terhadap kinerja aktual (*actual performance*), baik dalam proses maupun hasilnya.⁸ Proses pengawasan harus menunjukkan bahwa objek masukan (*input*) pengawasan adalah kondisi riil (nyata) dari kinerja (*performance*). Tujuan dari pengawasan (output-nya) adalah informasi yang tepat untuk bahan pelaporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijakan berikutnya (rekomendasi). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan suatu proses kegiatan yang dimulai dari monitoring, evaluasi, dan laporan. *Monitoring* adalah kegiatan pemantauan jalannya proses pelaksanaan rencana dan program. Evaluasi adalah suatu imbauan memberi putusan (menilai) baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan berjalannya program. Laporan merupakan kegiatan menyampaikan informasi mengenai baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan program sebagai hasil dari kegiatan evaluasi.

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 202), 12.

⁶ Arita, *Manajemen Sekolah Dasar*, 185-187.

⁷ Syaiful Sagala, *Kemampuan profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 211.

⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (PT Remaja Rosdakarya, 2009), 66.

Kepala sekolah sebagai manajer memiliki peran sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan anggaran sekolah. Hal ini dilaksanakan supaya tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dapat menjadi motivasi yang merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik, sehingga pengawasan tersebut mampu menjelaskan sampai sejauh mana orang-orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektifitas yang mereka miliki. Pengawasan sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organisasi.⁹

Pelaporan pelaksanaan pembiayaan sekolah dan identifikasi keuangan sekolah akan menjadi bahan laporan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban keuangan pendidikan meliputi aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan sampai menyusun semua bukti pengeluaran kemudian diuji kebenaran sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, disajikan sebagai pertanggungjawaban langsung dari bendaharawan atau untuk institusi yang terkait kepada atasan atau dalam hal ini yayasan yang menaungi sekolah. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan kegiatan pembukuan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, pegikhtisaran transaksi-transaksi keuangan.¹⁰

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada guru dan staf sekolah. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah yang dilakukan setiap triwulan, per semester, atau tiap akhir periode anggaran dengan menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi.

Metode Penelitian

Meninjau dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad Pematang yang terkait dengan perencanaan pembiayaan, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggung-jawaban pembiayaan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif

⁹ Sulistyorini, *Diktat Manajemen Pendidikan Islam*, 14

¹⁰ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 27.

analisis. Kasus yang diambil adalah pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad Pematang. Sekolah ini dipilih karena mampu untuk mempertahankan pembiayaan tentang pencairan dana BOS yang hanya cair 40% disemester pertama. Untuk melengkapi data, peneliti menggunakan perbandingan data dengan beberapa penelitian tentang pembiayaan pendidikan yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menganalisis data sekunder, maka cara memperoleh data peneliti sebagai instrument dan sebagai pengumpul data turun ke objek penelitian dan peneliti melakukan aktivitasnya. Sumber penelitian ini yaitu, Kepala Sekolah, Wakil kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Yayasan dan Komite. Tempat penelitian, yaitu SMP Al-Irsyad beserta semua aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan; dan paper yaitu berupa dokumen dan arsip-arsip berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad. Data penelitian ini yaitu data primer yaitu merupakan data yang utama diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, meliputi data informasi yang didapat melalui wawancara dan observasi di SMP Al-Irsyad; data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa dokumen dan arsip-arsip berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang disebut dengan data sekunder internal.

Penelitian ini menggunakan teknik, sebagai berikut. Pertama, metode observasi, peneliti melakukan observasi pada hari kerja dan bertemu langsung dengan kepala sekolah serta bendahara dan melihat langsung bagaimana kepala sekolah memberikan pengarahannya perihal kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan Sekolah. Observasi ini berusaha menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan pembiayaan Sekolah, sarana dan prasarana, serta pemeliharaan fasilitas lainnya yang ada di SMP Al-Irsyad Pematang. Kedua, metode dokumentasi, dokumen dalam penelitian ini antara lain dokumen tertulis, berupa surat keputusan, arsip-arsip Sekolah, RAPBS. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban pembiayaan Sekolah. Ketiga, metode wawancara, pada penelitian tahap awal peneliti menggunakan teknik wawancara yang tak terstruktur, yaitu dengan melakukan wawancara dengan sifat bebas, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada subyek untuk memberikan keterangan yang tidak dapat digali ketika dalam proses wawancara terstruktur, selain itu metode ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sifatnya mendalam sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik analisis data pada penelitian ini sebagai berikut: (1) pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah mencatat data yang didapatkan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara kepada pihak dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan

secara objektif; (2) reduksi data, data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai sasaran penelitian sehingga dapat memberi gambaran tentang penelitian ini; (3) penyajian data ini bertujuan agar data yang sudah dikumpulkan dan direduksi dapat disampaikan secara mudah sehingga mampu dipahami oleh pembaca; (4) kesimpulan dan verifikasi data yang digunakan sebagai suatu hasil pengambilan data lapangan melalui informasi yang mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kesimpulan ini berdasarkan pengambilan data, reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan SMP Al-Irsyad Pemalang

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad, yaitu (1) perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad, (2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan (3) pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad.

Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pendidikan

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Ranoto Kepala Sekolah SMP Al-Irsyad dan Wakasek Sarpras dan bendahara sekolah serta bendahara BOS terkait dengan perencanaan penganggaran pembiayaan pendidikan yang termasuk dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad. Membahas tentang manajemen pembiayaan yang menyangkut proses penganggaran biaya pendidikan di SMP Al-Irsyad, prosesnya yang pertama diawali dengan melakukan rapat kerja tahunan (RAKS) bersama anggota rapat. Kemudian, anggota rapat membuat draft anggaran. Dari draft itu kemudian dibuat proposal yang nantinya akan diajukan ke Yayasan Al-Irsyad Cabang Pemalang untuk disahkan atau disetujui.

Alurnya dirapatkan dulu dengan Kepala Sekolah kemudian diajukan ke Yayasan Cabang Al-Irsyad Pemalang. Setelah disetujui pihak Yayasan kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan sepengetahuan Yayasan pastinya. Hal ini diperkuat ketika peneliti bertanya kepada Bendahara sekolah dan bendahara BOS terkait dengan proses penganggaran pembiayaan pendidikan yang termasuk dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad.

Sebagai lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Nasional (DikNas) SMP Al-Irsyad mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Diknas Kabupaten Pemalang, SMP Al-Irsyad juga mendapatkan bantuan dana dari uang partisipasi orang tua

untuk mendukung semua kegiatan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran yang tidak terpenuhi oleh Dana BOS agar dapat berjalan dengan baik. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator, adapun sumber pembiayaan sekolah SMP Al-Irsyad adalah sebagai berikut.

Pertama, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumber dana pendidikan SMP Al-Irsyad yang pertama yaitu dari pemerintah berupa dana BOS yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dalam kwitansi/bukti penerimaan Dana BOS tahun 2018 SMP Al-Irsyad menerima dana BOS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018. Berdasarkan pada rapat penyusunan RAPBS SMP Al-Irsyad mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober SMP Al-Irsyad mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Kedua, Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sumber dana pendidikan yang kedua SMP Al-Irsyad yaitu dari biaya penerimaan peserta didik baru. Uang yang dipungut dari siswa sebesar Rp.20.000 setiap siswa yang mendaftar ke SMP Al-Irsyad, uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan administrasi siswa yang mendaftarkan diri. Akan tetapi bagi siswa yang pindahan ke kelas 8 sampai kelas 9 dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,00. Kebijakan ini dibuat supaya kebutuhan siswa baru dalam hal administrasi dapat terpenuhi.

Ketiga, dana donatur. Kondisi ekonomi orang tua siswa di SMP Al - Irnyad beragam ada yang kelas ekonomi menengah dan ada pula yang tergolong orang kaya atau mampu serta hampir setengahnya di ekonomi kelas bawah yang sebagian besar mata pencahariannya petani dan wiraswasta sehingga pihak sekolah maupun yayasan memberikan penawaran kelas ada yang kelas unggulan dengan SPP per bulanya Rp. 150.000,00 dan ada juga kelas reguler yang biaya SPPnya Rp. 100.000,00 per bulan serta didukung oleh Dana bantuan dari pemerintah. Akan tetapi apabila ada kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh dana BOS seperti untuk mengadakan acara Peringatan Besar Hari Islam (PHBI) maka pihak sekolah melakukan rapat bersama orang tua untuk membahas tentang pengadaan dana dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ada juga dari orang tua siswa yang mampu memberikan sumbangan sukarela, sehingga terbantu untuk pembiayaan pendidikan.

Keempat, dana Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP/SPP). Sumbangan dana ini bersifat wajib dan mengikat, sehingga siswa membayar SPP ini setiap bulan, untuk kelas unggulan Rp. 150.000,00 dan kelas Reguler Rp. 100.000,00.

Pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irnyad diawali dengan membuat perencanaan yang dibuat oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara dan

Operator, adapun kegiatannya sebagai berikut: merumuskan tujuan dan program Sekolah berdasarkan visi dan misi Sekolah dan menentukan besaran biaya pendaftaran siswa baru yang sebelumnya dilakuka rapat guru dan pihak yayasan. SMP al Irsyad bernaung dibawah Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah Cabang Pemalang dan Lajnah Pengajaran dan Pendidikan Al-Irsyad Pemalang, selanjutnya Kepala Sekolah membuat dan memilih program yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai pada satu tahun kedepan dengan berpedoman pada visi misi yang sudah ditentukan sebelumnya, menentukan jumlah anggaran untuk alokasi per kegiatan Sekolah. Tujuan dan program sekolah sudah ditentukan kemudian membuat Rancangan Anggaran Biaya.

Tabel 1:
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
Dana bantuan BOS Tahun Pelajaran
2018/2019

I	No.	Sumber Pendapatan	Nilai	Jumlah
	1	Dana BOS, Tri Wulan 3, Juli-September 2017	Rp. 84.800.000	
	2	Dana BOS, Tri Wulan 4, Oktober-Desember 2017	Rp. 84.800.000	
	3	Dana BOS, Tri Wulan 1, Januari-Maret 2018	Rp. 84.800.000	
	4	Dana BOS, Tri Wulan 2, April-Juni 2018	Rp.169.000.000	Rp.424.000.000

I	No	Pengeluaran	Biaya	Jumlah
	1	Honorarium Guru dan Karyawan Rp.14.840.000 x 12	Rp. 178.080.000	
	2	Honorarium Tim Pengelola BOS	Rp. 7.200.000	
	3	Transport Pengambilan dana BOS ke Bank	Rp. 300.000	
	4	Honorarium Tim Pengelola Website	Rp. 3.000.000	
	5	Pembelian dan Perbaikan Printer	Rp. 2.500.000	
	6	Pembelian Ac Perpustakaan	Rp. 3.500.000	
	7	Pembelian LCD Proyektor	Rp. 5.000.000	
	8	Pengembangan Perpustakaan	Rp. 2.500.000	
	9	Pengecatan dan Perbaikan Gedung	Rp. 5.000.000	
	10	Pengembangan Sekolah Hijau	Rp. 5.000.000	
	11	Daya dan Jasa (telepon, listrik, koran PAM dan Internet	Rp. 41.440.000	
	12	Kegiatan MGMP	Rp. 5.000.000	
	13	Peningkatan Kompetensi Guru	Rp. 5.000.000	

	dan karyawan		
14	Kegiatan Siswa	Rp. 25.600.000	
15	Ulangan dan Ujian	Rp. 39.000.000	
16	Alat praktek/peraga mata pelajaran	Rp. 6.500.000	
17	Alat Praktek Ekstra kurikuler	Rp. 11.000.000	
18	Alat Tulis Kantor(ATK)	Rp. 17.367.000	
19	Penajaman Materi	Rp. 10.000.000	
20	Konsumsi Guru dan Karyawan	Rp. 5.000.000	
21	Gas LPG	Rp. 1.500.000	
22	Pembelian Buku Wajib Siswa	Rp. 36.305.000	
23	PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020	Rp. 6.000.000	
24	Laporan dan Pajak	Rp. 2.208.000	
	Jumlah	Rp. 424.000.000	Rp.424.000.000
	Saldo	Rp.0	Rp.0

Tabel 2:
Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah
Dari Dana Sumbangan Operasional Sekolah (SOP)
Tahun Pelajaran 2018/2019

	Uraian	Jumlah
I	Peamasukan	
	1. SOP Kelas VII	
	a. Unggulan 39 x Rp. 150.000 x 12	Rp.70.200.000
	b. Reguler 71 x Rp. 100.000 x 12	Rp. 85.200.000
	Total	Rp. 155.400.000
	2. SOP Kelas VIII	
	a. Unggulan 49 x Rp. 150.000 x 12	Rp. 88.200.000
	b. Reguler 105 x Rp. 75.000 x 12	Rp. 94.500.000
	Total	Rp. 182.700.000
	3. SOP Kelas IX	
	a. Unggulan 52 x 100.000 x 12	Rp. 62.400.000
	b. Reguler 105 x 65.000 x 12	Rp. 84.240.000
	Total	Rp. 146.640.000
	Total Jumlah	Rp. 484.740.000
	Subsidi Sekolah Untuk : Yatim Piatu/Yatim/SKTM	
	1. Kelas VII	
	a. Unggulan 12 x Rp. 200.000	Rp. 2.400.000
	b. Reguler 12 x Rp. 250.000	Rp. 3.000.000
	2. Kelas VIII dan Kelas IX	
	a. Unggulan 12 x 610.000	Rp. 7.320.000
	b. Reguler 12 x 445.000	Rp. 5.340.000
	Total Jumlah	Rp. 18.060.000
	Total Pendapatan	Rp. 466.680.000
II	Uraian	Jumlah
	Pengeluaran	
	1. Honorarium Guru/Karyawan 12 x Rp. 17.500.000	Rp. 295.644.000 Rp. 37.200.000

	2. Tunjangan Beras 275 x 12 x Rp. 9.500	Rp. 4.320.000
	3. Tunjangan BPJS 4 x Rp.700.000	Rp. 2.800.000
	4. Kekeluargaan 17 x Rp. 18.000 x 12	Rp. 3.600.000
	5. Pembinaan Kedinasan	Rp. 3.339.200
	6. MKKS/IKKS/BMPS	Rp. 12.000.000
	7. Pakaian Kerja Guru dan Karyawan 42 Orang	Rp. 19.800.000
	8. Pesantren Ramadhan dan THR	Rp. 64.500.000
	9. Kegiatan Ulangan dan Ujian	Rp. 14.000.000
	10. PPDB 2019/2020	Rp. 2.500.000
	11. Sumbangan atau Kegiatan Sosial	Rp. 1.950.000
	12. Tim Pencairan PIP	Rp. 3.000.000
	13. Reward Guru atau Karyawan	
	Jumlah	Rp. 464.653.200
	Saldo Akhir = Rp. 466.680.000 - Rp. 464.653.200	Rp. 2.026.800

Tabel 3:
Rencana Alokasi Anggaran Tiap Semester

No	Kode	Konten Manajemen	Jumlah dalam Rupiah	Semester	
				I	II
1	2	3	4	5	6
1	1.1	Pembiayaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	188.280.000	94.140.000	94.140.000
2	2.1	Pemeliharaan Standar sarana prasarana	55.367.000	28.180.000	27.187.000
3	3.1	Pengembangan Standar Isi	25.600.000	12.800.000	12.800.000
4	4.1	Pengembangan Standar Proses	39.000.000	19.500.000	19.500.000
5	5.1	Pembiayaan Standar Penilaian	18.500.000	9.250.000	9.250.000
6.	6.1	Pengembangan Standar Pengelolaan	36.305.000	18.152.500	18.152.500
7	7.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	30.000.000	15.000.000	15.000.000
8	8.1	Pengendalian Sistem Pembiayaan	30.000.000	15.000.000	15.000.000
Jumlah					

Pemanfaatan Pembiayaan Pendidikan

Setelah perencanaan pembiayaan selesai dibuat dan disetujui oleh ketua komite sekolah dan kepala sekolah, sehingga pelaksanaan perencanaan pembiayaan dalam hal ini menyangkut urusan penggunaan pembiayaan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Semua penerimaan anggaran dari dana bos yang sudah cair langsung masuk ke rekening sekolah, untuk menggunakan dana tersebut kepala sekolah berkoordinasi dengan bendahara kemudian dana digunakan sesuai dengan RKAS dan sesuai dengan juknis dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Semua

penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku KAS Umum. Dana BOS yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tercatat dalam RKAS, namun penggunaan dana seringkali pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disusun dalam RKAS.

Adapun faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini dikarenakan pencairan dana BOS tidak sesuai dengan jumlah RKAS dan waktu pencairan terkadang tidak diawal semester sehingga untuk menutupi kebutuhan sekolah sebelum dana bos cair kepala sekolah menggunakan uang dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP/SPP) untuk menutupinya atau meminjam tabungan siswa yang nanti diganti setelah dana BOS cair.

Adapun proses pencairan dana BOS yaitu membuat surat perjanjian kerjasama yang di tanda tangani oleh pihak pertama atas nama Kementerian Agama dan pihak kedua atas nama Masrasah Ibtidaiyah Al-Misbah, kemudan kepala madrasah menandatangani kwitansi bukti penerimaan dana bantuan selanjutnya uang masuk pada rekening sekolah dan bisa dicairkan pada saat madrasah membutuhkan uang tersebut. Dana BOS dicairkan oleh kepala madrasah dan yang memeagang angnya yaitu bendahara sekolah. Bantuan dana pendidikan dari pemerintah tersebut digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah, selain itu kepala madrasah juga menetapkan beberapa guru honorer dan tenaga kependidikan honorer penerima honor dana BOS. Besaran honor yang diberikan berdasarkan masa pengabdian.

No	Nama	Jabatan	Honor/bulan
1	Ranoto, S.Pd.I	Kepala Sekolah	Rp. 2.337.000
2	Casto, S.Pd.	Wakasek Kurikulum	Rp. 1.342.500
3	Janu Pranyoto, S.Pd.	Waka Sarpras	Rp. 1.269.000
4	Sustriyono, S.Pd.	Waka Kesiswaan	Rp. 1.043.500
5	Via Dwi Verawanti, S.Pd.	Guru Wali Kelas	Rp. 1.116.000
6	Kholifaturrohmah, S.Pd.	Guru Wali Kelas	Rp. 1.368.000
7	Drs. Rohmat Slamet	Guru Mapel	Rp. 1.164.000
8	Endang Yuliwati, S.Pd.	Guru Kelas	Rp. 1.291.500
9	Eli Wahyuningsih, S.Psi.	Guru BK	Rp. 1.062.000
10	Novia Herawati, S.Pd.	Guru Wali Kelas	Rp. 1.218.000
11	Nurochmah F, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 381.000
12	Sandya K.N.,S.T, S.Pd.	Guru Praktikum	Rp. 585.000
13	Agus Priyono, S.Pd.I	Guru Mapel	Rp. 636.500
14	Wiyanti, S.Pd.	Guru Wali Kelas	Rp. 1.094.500
15	Dina Setiawati, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 865.000
16	Arsaladin, S.Pd.	Guru Wali Kelas	Rp. 1.043.500
17	Fahrudin, S.Pd.	Kordinator BK	Rp. 891.000
18	Trio Imam P, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 1.018.000
19	Sri Mulya Anah, S.Pd.	Guru Wali Kelas	Rp. 815.000
20	Charis Nurochman, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 1.044.500

21	Lulu Askar, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 1.630.000
22	Nur Faizah, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 992.500
23	Zaenuddin, S.Sy	Guru Mapel	Rp. 1.121.000
24	Uswandi, S.Pd.I	Guru Mapel	Rp. 968.000
25	Umi Ulfa, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 816.000
26	Desi Nur Hardiwati, S.Pd.I	Guru Mapel	Rp. 867.000
27	Miskiyah Dwi Permata, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 714.000
28	Rahardika Margina, S.Pd.	Guru Mapel	Rp. 688.500
29	Esky Purba Septina, S.Pd.	Guru Wali Kelas	Rp. 637.500
30	Ahmad Sholeh, S.Sos.I	Guru BK	Rp. 662.000
31	Suharno	Kepala Tata Usaha	Rp. 1.751.500

SMP Al-Irsya yang bernaung dibawah yayasan Cabang Al-Irsyad Pemalang merupakan lembaga pendidikan dengan profit yang tinggi tetapi dalam pemberian honor terhadap guru maupun tenaga kependidikan lainya belum dapat dikatakan memenuhi kesejahteraan. Tenaga Pendidik dan Kependidikan digaji berdasarkan lamanya masa kerja dan pengabdian sehingga tidak menjamin guru yang sudah sarjana bisa lebih tinggi gajinya dari pada staf tata usaha. Selain didukung dana BOS SMP Al-Irsyad juga memungut SPP dari siswa yang besaran cukup lumayan menjanjikan sebagai sekolah Full day School yang memilki program unggulan Tahfidz Qur'an. Di tengah Kabupaten Pemalang kota kecil di Jawa Tengah SPP Rp. 150.000 untuk unggulan dan Rp.100.000 untuk reguler tergolong mahal, akan tetapi siswa yang masuk ke Al-Irsyad tiap tahun makin meningkat, hal ini berarti minat masyarakat terhadap SMP Al-Irsyad mengalami peningkatan.

Pengawasan dalam Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan dalam penggunaan dana BOS dan dana Sumbangan Operasional Pendidikan yang bukan dari pemerintah dilakukan secara berkala setiap sebelum melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi apakah pengeluaran dan penggunaan dana sudah sesuai dngan yang direncanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, pengawasan dilakukan oleh Pengawas yang tunjuk oleh Dinas Pendidikan. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan penerimaan dana yang masuk dilakukan dengan memberikan buku KAS Umum, pengawasan pengeluaran memeriksa semua bukti transaksi seperti struk pembelian/pembayaran, kwitansi, nota, fatur, dan lain-lain.

Pada pelaksanaa pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh pengawas/penilik dari Kementerian Pendidikan Daerah Kabupaten Pemalang tidak hanya melihat buku laporan keuangan tapi juga melihat kondisi fisik sekolah dan perkembangan yang terjadi pada Sekolah. Selama seluruh proses kegiatan pembelajaran berjalan baik dan kondusif maka pengelolaan sekoah juga dianggap baik. Yayasan dan komite

sekolah juga turut serta dalam pengawasan penggunaan pembiayaan pendidikan yang bukan dari pemerintah ini bertujuan agar akuntabilitas pembiayaan terjaga dengan baik.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Setelah pengawasan dan pemeriksaan dilakukan, maka pelaporan dan pertanggung jawaban sekolah terhadap pemasukan dan pengeluaran pembiayaan dengan membuat laporan dan pertanggung jawaban dana BOS dan dana pembiayaan yang bukan dari pemerintah yang dibuat oleh bendaharawan sekolah. Pelaporan atas pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir semester, laporan tersebut diperiksa apakah pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah sudah sesuai dengan RKAS atau apakah belum sesuai, selain itu juga pelaporan dan pertanggungjawabn tersebut berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan SMP Al-Irsyad Pemalang.

Proses pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dana BOS yang akan dilaporkan pada Dinas Pendidikan sebagai berikut. Pertama, akhir semester, bendaharawan sekolah akan membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sekolah dan kemudian disesuaikan RKAS. Kedua, laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menguraikan semua penerimaan dan pengeluaran selama satu semester yang sedang berjalan dengan melampirkan semua bukti transaksi seperti struk pembayaran dan pembelian, kwitansi, faktur, nota dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan dana BOS. Ketiga, laporan yang dibuat menjelaskan total penerimaan dan pengeluaran selama satu semester dan setiap laporan pengeluaran di tanda tangani oleh kepala Sekolah. Keempat, laporan dibuat dua buah yaitu laporan dan pertanggungjawaban dana BOS yang nanti diperiksa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dan satu lagi laporan dari dana Sumbangan Operasional Pendidikan yang bersumber dari siswa yang nanti akan diperiksa oleh pihak yayasan. Laporan semua kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan kemudian diperiksa oleh Dinas Pendidikan dan laporan keuangan yang bukan dari pemerintah diperiksa Yayasan dan komite Sekolah, kemudian laporan ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi perencanaan pembiayaan pendidikan pada semester selanjutnya.

Pembahasan Data

SMP Al-Irsyad merupakan Sekolah swasta yang bernaung di bawah Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah Cabang Pemalang, kendati demikian SMP Al-Irsyad pucuk kebijakannya tidak bersifat sentral maksudnya yayasan tidak turut serta dalam menentukan kebijakan madrasah melainkan berperan sebagai pengawas dan mengontrol untuk proses

pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan pembiayaan adalah kepala sekolah. Kepala Sekolah sebagai top manajer kemudian dibantu oleh bendahara sekolah dan seluruh karyawan yang berada dilingkungan SMP Al-Irsyad.

Pengelolaan pembiayaan SMP Al-Irsyad sudah dibilang baik sebab pelaporan pertanggung jawaban dana BOS dibuat sangat baik, rapi dan sesuai dengan juknis penggunaan dana BOS yang ditetapkan pemerintah. Namun dalam pengawasan pembiayaan belum melibatkan orang tua siswa untuk turut dalam dalam proses pengawasan sehingga peran orang tua siswa sebagai komite sekolah belum nampak dalam hal tersebut. Masalah yang dihadapi sekolah dalam pembiayaan sekolah yaitu seringkali dana bantuan dari pemerintah tidak mencukupi biaya untuk seluruh kegiatan yang berlangsung disekolah. Menghadapi kebijakan pendidikan yang gratis. Sekolah swasta sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah sebagai sumber pembiayaannya, sebagaimana SMP Al-Irsyad pun melakukan pembiayaan mandiri dengan memungut SPP siswa perbulan nya seabagi biaya kegiatan KBM dan melakukan pendekatan kepada orang tua siswa dan masyarakat melalui komite sekolah untuk memperoleh bantuan pembiayaan guna memperlancar proses pembelajaran di sekolahnya.

Perencanaan pembiayaan pendidikan dibuat berdasarkan kebutuhan Sekolah untuk satu tahun ajaran, selain kebutuhan sekolah pihak lembaga juga memikirkan kebutuhan peserta didik seperti buku pelajaran dan perlengkapan kantor, dengan besaran jumlah dana BOS untuk setiap siswa yaitu Rp. 1.000.000,- dengan jumlah rombongan belajar 5 suntuk setiap kelas sehinggann besaran dana bos yang di terima SMP Al-Irsyad cukup banyak. Hal ini menjadi membantu pembiayaan sekolah, akan tetapi dana BOS untuk semester pertama hanya cair 40% saja ini mejadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembiayaan, bendahar dan pihak yang terlibat untuk mampu membuat perencanaan pembiayaan pendidikan yang memungkinkan mampu memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan peserta didik dalam KBM yang berjalan efektif, efisien dan kondusif.

Penggunaan pembiayaan harus disesuaikan dengan RKAS menggunakan prinsip skala proritas yang sudah ditetapkan, dana BOS yang sudah di transfer ke rekening Sekolah kadang kala semuanya dapat langsung diambil oleh kepala sekolah dan proses pencairan dana BOS juga berlangsung satu sampai dua tahap tergantung kebijakan pemerintah yang berwenang. Fenomen inilah yang mengharuskan pihak Sekolah menggunakan sistem skala prioritas. Skala prioritas yaitu serangkaian daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan yaitu dari kebutuhan yang paling penting sampai daftar kebutuhan yang dapat ditunda.

Pengawasan terhadap manajemen pendidikan hendaknya dilakukan lebih baik lagi dan secara rutin serta menyeluruh hingga dapat meminimalisir terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan BOS. Pencatatan transaksi keuangan sekolah hendaknya mulai menggunakan prinsip akuntansi yaitu dimulai dengan membuat jurnal umum, kemudian posting kedalam buku besar agar lebih rinci atau jika ingin melakukan pencatatan secara umum, maka menggunakan buku umum, buku khusus, buku pembantu, dan neraca saldo sehingga kondisi keuangan Sekolah dengan mudah dapat diketahui dan memudahkan juga dalam proses pengawasan. Akhir dari semua proses pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk elemen yang terlibat baik bagi kepala sekolah, komite sekolah, seluruh pendidika dan tenaga kependidikan serta siswa yang menjadi objek utama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan agar terpenuhi semua kebutuhannya disekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad Kabupaten Pemalang bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad dimulai dengan memilih program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ajaran kedepan, kemudian menentukan besaran biaya pendaftaran bagi siswa yang masuk. Kepala Sekolah dan bendaharawan sekolah kemudian membuat RKAS berdasarkan jumlah dan kebutuhan siswa selama satu periode pembelajaran atau satu tahun.

Selanjutnya dapat disimpulkan beberapa simpulan khusus, sebagai berikut. Pertama, perencanaan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Pemalang telah dilakukan dengan baik oleh Tim Manajemen BOS sekolah. Adapun perencanaan pengelolaan pembiayaan di SMP Al-Irsyad Pemalang dibuat pada saat penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dengan proses penyusunan yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk diawali dengan EDS, dengan melibatkan seluruh komponen sekolah sesuai dengan petunjuk. Kedua, efektifitas pelaksanaan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Pemalang telah dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan guru dan komite sekolah. Penggunaan biaya pendidikan dengan meminta masukan dan pendapat tentang kebutuhan sekolah, penggunaan dana BOS sesuai dengan perencanaan atau sesuai RAPBS. Mengenai prosedur pengambilan dana BOS disesuaikan dengan waktu pencairan yang dipegang oleh bendahara. Ketiga, pengawasan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad dilakukan oleh instansi terkait seperti dari Inspektorat pusat dan daerah, dari dinas, dari komite sekolah, dan dari kepala sekolah. Keempat, faktor-

faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Pematang.[]

Daftar Pustaka

- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Marini, Arita. *Manajemen Sekolah Dasar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 202.
- Murtadlo, Muhammad. "Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Swasta Unggulan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 14, no 1 (April 2016).
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.